

LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP) 2022



KANTOR KECAMATAN PURI
KAB. MOJOKERTO

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT, marilah kita bersama-sama tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai ini.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dan dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut di atas, kami telah berusaha menyajikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Puri Tahun Anggaran 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Puri Tahun 2022 ini merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan Perencanaan Strategis (Renstra) tahun 2021 – 2026 , yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dan semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Puri, Januari 2023



NALURITA P., SSTP., M.Med.Kom.

Pembina

NIP. 19810402 199912 2 001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi	2
C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
D. Isu Strategis Perangkat Daerah	4
E. Sistematika Penyajian	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Kinerja Tahunan.....	6
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja	11
B. Analisis Capaian Kinerja	17
C. Realisasi Anggaran	20
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	23

Lampiran-lampiran :

1. Matriks Renstra Kecamatan Puri 2021 - 2026
2. Matriks Renja PAPBD Kec. Puri Tahun 2022
3. Realisasi Anggaran Kec. Puri Tahun 2022
4. Struktur Organisasi OPD Kecamatan Puri 2022
5. IKU / IKI Kecamatan Puri
6. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
7. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022
8. Laporan Kinerja JFU

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut diselenggarakan program pembangunan Nasional secara berkelanjutan, terencana dan terarah.

Sesuai dengan ketetapan MPR Nomor : XI/MPR/1998 dan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme, yang selanjutnya telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai Unsur Penyelenggara Negara untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta perannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

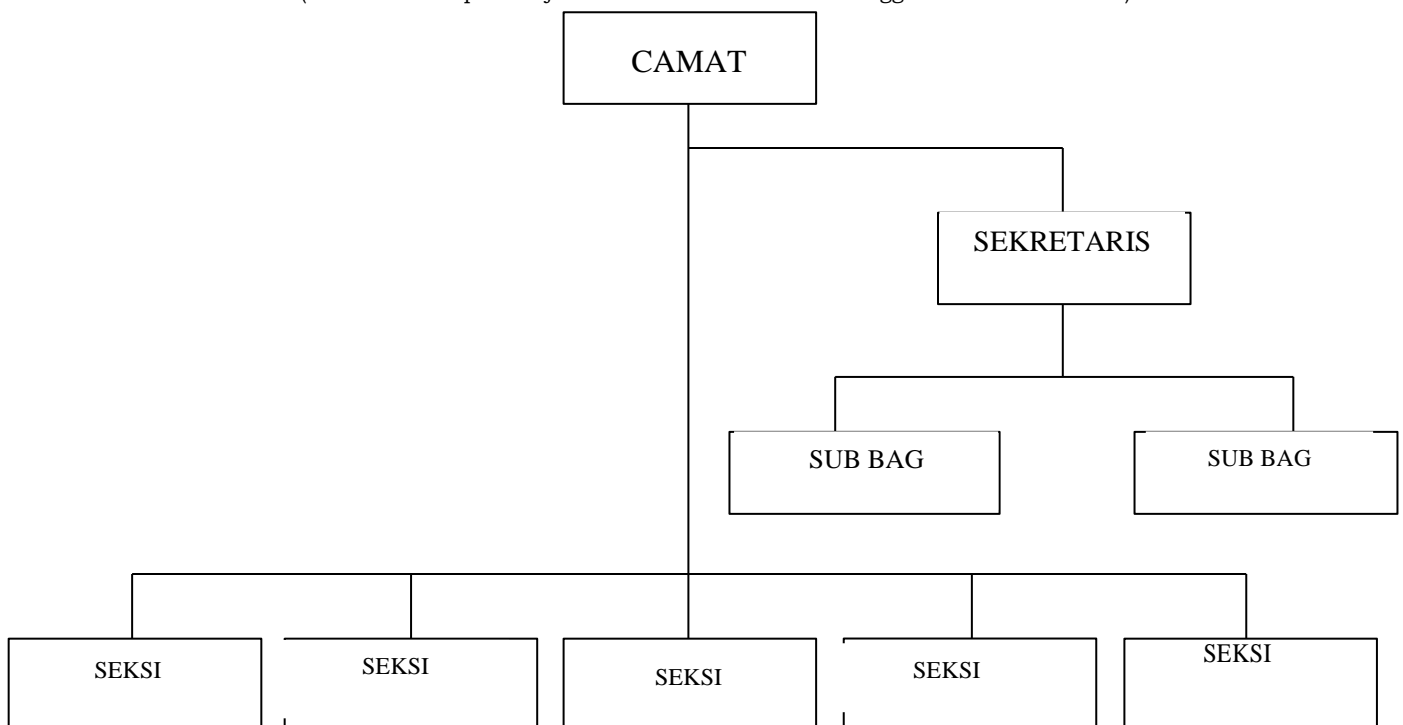
Berdasarkan hal tersebut, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Puri Tahun 2022 sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Hal ini semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa Kantor Kecamatan Puri mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes, disisi yang lain, penyusunan LKjIP Kantor Kecamatan Puri juga dimaksudkan sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting pelaksanaan good governance dan menjadi cermin untuk mengevaluasi kinerja organisasi selama satu tahun agar dapat melaksanakan kinerja ke depan secara lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

1. Camat.
2. Sekretaris
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
5. Seksi Pemerintahan
6. Seksi Pembangunan
7. Seksi Kemasyarakatan
8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
9. Seksi Pelayanan

STRUKTUR ORGANISASI KEC.PURI KAB.MOJOKERTO (Peraturan Bupati Mojokerto No 80 Tahun 2016 tanggal 28 Oktober 2016)



C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Puri berada pada bagian selatan ibukota Kabupaten Mojokerto dengan luas wilayah 35.697 km² yang terdiri dari 2.276,181 km² lahan pertanian dan non pertanian 33.420,819 km² lahan perumahan dan pekarangan. Wilayah Kecamatan Puri terletak pada ketinggian antara 48 m diatas permukaan air laut. Adapun batas – batas wilayah kecamatan Puri sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kota Mojokerto
- Sebelah Timur : Kecamatan Dlanggu
- Sebelah Selatan : Kecamatan Jatirejo
- Sebelah Barat : Kecamatan Sooko, Kec. Trowulan

PETA WILAYAH KECAMATAN PURI



Dalam kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Kantor Kecamatan Puri mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan

- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

D. Isu Strategis

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah .

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 - 2026 yakni:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia
2. Tata kelola pemerintahan yang berkualitas, cerdas (smart) dan bermanfaat
3. Pengentasan masyarakat miskin dan yang termarginalkan
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif
5. Peningkatan sumber daya fisik/ infrastruktur dan lingkungan yang berkualitas dengan dukungan IT

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Kantor Kecamatan Puri selama tahun 2022. Capaian kinerja (performance results) 2022 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) 2021 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 62 Tahun 2018 sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kecamatan Puri Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

B. Realisasi Anggaran, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan, dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup, menguraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana strategis Kantor Kecamatan Puri Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto yang terdiri dari sasaran dan indikator kinerja yang harus dicapai Kantor Kecamatan Puri pada tahun 2022 sebagai berikut :

RKT KECAMATAN PURI TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	84
2	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	66

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja dijelaskan bahwa Perjanjian kinerja adalah lembar / dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Secara umum format perjanjian kinerja terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu Pernyataan Perjanjian Kinerja dan Lampiran Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022 Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KECAMATAN PURI KABUPATEN MOJOKERTO**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	1.1	IKM Kecamatan	84
		1.2	Persentase Pelayanan yang Terlayani sesuai standart pelayanan	81 %
		1.3	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	81 %
		1.4	Persentase jumlah perijinan dan non perijinan yang terlayani sesuai standart pelayanan	100 %
		1.5	Jumlah Fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang Pemerintahan,Pembangunan,Ke tentraman dan Ketertiban Umum serta Kesejahteraan masyarakat	4 Fasilitasi
		1.6	Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	7 Inovasi
2	Terwujudnya Tata Kelola Birikrasi Perangkat Daerah	2.1	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	66
		2.2	Nilai Sakip Perangkat Daerah	83
		2.3	Persentase indicator program perangkat daerah yang tercapai	100 %
		2.4	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah .	81 %
		2.5	IP ASN Perangkat Daerah	60

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.636.893.896,00	PAPBD 2022
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 50.000.000,00	PAPBD 2022
3.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 342.099.500,00	PAPBD 2022

C . Rencana Strategis Organisasi

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2021 – 2026, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun tujuan Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 adalah Meningkatnya kualitas pelayanan public sesuai dengan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yaitu pada Misi 3 yaitu **Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Berintegritas, Akutanbel, Bersih, Transparan.**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021 – 2026. Sasaran Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah
2. Terwujudnya Pelayananab public yang Optimal

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto pada 2021 – 2026 adalah sebagaimana tabel berikut :

Target Kinerja Dari Tujuan Dan Sasaran

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	65	66	67	68	69	70
		Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	IKM Kecamatan	82	84	85	86	87	88

D . Rencana Kerja

Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Puri Tahun 2022 mengacu pada Tujuan Kecamatan Puri yang tertuang pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Puri untuk 5 tahun mendatang yaitu **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik** , dengan 2 sasaran yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal dan Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintah Daerah di dukung dengan Program dan kegiatan antara lain :

- a. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3) Penyediaan bahan Logistik Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
 - 5) Penyediaan Bbn Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan
 - 6) Penyediaan Bahan/Material
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Administrasi Kepegawai Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan
 - 2) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 3) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

b. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN

PUBLIK

1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha
 - 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan

c. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1) Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - 2) Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - 3) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 4) Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Puri Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kecamatan Puri Tahun 2022 dengan realisasinya . Tingkat capaian kinerja Kecamatan Puri Tahun 2022 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

a) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.1
Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	IKM Kecamatan	84	89,32	106.3
		Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai standart pelayanan	81 %	100 %	123.5%
		Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti	81 %	100 %	123.5 %
		Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan,Pembangunan,Ketertarikan ketertiban umum serta Kesejahteraan Masyarakat	4	4	100 %
		Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan	7	7	100 %

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
2	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	66	82,44	124,9 %
		Nilai Sakip Perangkat Daerah	83	84,23	101.7 %
		Persentase Indikator program perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %
		Persentase Realisasi anggaran Perangkat Daerah	81 %	94.63 %	116.8 %
		IP ASN Perangkat Daerah	60	73.33	122.2 %

(Data Perjanjian Kinerja Tahun 2022)

Uraian Penjelasan tabel :

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa pada umumnya untuk semua indikator capaian kinerja yang direncanakan semuanya dapat tercapai dari target yang telah direncanakan melalui perjanjian kinerja camat puri tahun 2022 .

b) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun lalu dengan dua tahun terakhir

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI		
			Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022
Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	Nilai IKM	84	84.68	89.02	89.32
	Persentase rekomendasi fasilitasi serta hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan sosial.	81 %	100 %	100 %	100 %

Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	66	-	-	82,44
	Nilai Sakip Perangkat Daerah	83	80,96	82,43	84,43
	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang terlaksana	100	100	100	100
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	81 %	96,29	77,39	94.63
	Nilai Indeks Profesionalisme ASN	60	-	73.33	-

Uraian penjelasan tabel :

Pada tahun 2022 secara umum terjadi kenaikan capaian realisasi target kinerja secara umum disbanding dengan realisasi tahun lalu dan tahun tahun sebelumnya ada indicator hal ini dipengaruhi adanya dukungan anggaran dan dokumen dokumen yang lainnya

c) Membandingkan realisasi kinerja s/d akhir tahun renstra

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Puri Kab. Mojokerto tahun 2021 -2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI	TINGKAT KEMAJUAN
Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	Nilai IKM	88	89,32	98.5
	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : Pemerintahan, Pembangunan perekonomian, ketenagakerjaan dan ketertiban umum serta kesejahteraan social.	100 %	100 %	100 %
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	70	82,44	84.91

	Nilai Sakip Perangkat Daerah	87	84.23	101.04
	Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang terlaksana	100	100	100
	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah	85	94,63	89.82
	Nilai Indeks Profesionalisme ASN	64	73,33	87.27

Uraian penjelasan tabel :

Dari uraian tabel diatas dapat disimpulkan untuk indikator kinerja indek Kepuasan masyarakat memiliki harapan yang tinggi untuk mencapai target pada akhir masa tahun rencana strategis 2021-2026 , sedangkan untuk nilai IP ASN kecamatan Puri masih harus meningkatkan nilai yang cukup agar dapat mencapai target pada akhir masa rencana strategis 2021-2026.

d) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan realisasi Nasional

**Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	Nilai IKM	89,32	-	-
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	82,44	-	-

**Tabel 3.5
COST PER OUTCOME
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR	ANGGARAN	%
-----------	----------------	------------------	-----------------	----------

	STRATEGIS	KINERJA		ANGGARAN
1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang optimal	Nilai IKM	392.099.500	9,7
2	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	3.636.893.896	90,3

Uraian penjelasan tabel :

Dari uraian tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan tata Kelola birokrasi di kecamatan puri didukung anggaran sebesar 90,3 % dari total anggaran yang ada , sedangkan untuk mewujudkan pelayanan public yang optimal hanya didukung anggaran 9,7 % dari total anggaran yang ada di tahun 2022 . berikut kami sajikan tabel target pencapaian kinerja dan anggaran sebagai tabel berikut :

Tabel 3.6
COST PER OUTCOME
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN

SASARAN / PROGRAM	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
		TAR GET (%)	REA LISA SI (%)	CAP AIAN (%)	ALOKASI (Rp.)	REALISASI (Rp.)	CAPAI AN (%)
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintah Daerah 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	66	82,4 4	124, 9	3.636.893.896	3.428.644.347	94,27
Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal 1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Nilai IKM Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun bidang : Pemerintahan, Pembangunan perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum serta kesejahteraan	84 81	89,3 2 100	106,3 123.5	392.099.500 50.000.000 342.099.500	383.912.200 49.822.000 334.090.200	97,91 99,64 97,65

	social.						
--	---------	--	--	--	--	--	--

Uraian penjelasan tabel :

Dari uraian tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa untuk Sasaran pertama Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah, dengan indicator Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Puri dan Nilai Sakip dari Target tahun 2022 Nilai RB : 66 diperoleh nilai RB tahun 2022 : 82,44 sehingga dapat tercapai : 124,9 % , dan untuk Target Nilai Sakip tahun 2022 : 83 didapat nilai tahun 2022 : 84,23 sehingga tercapai 101,7 % , Adapun Program yang dilaksanakan adalah : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota dengan kegiatan :

- Perencanaan , Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD

Sasaran kedua mewujudkan Pelayanan Publik yang optimal, dengan indikator nilai IKM Kecamatan , target 84, realisasi 89,32 dengan capaian 106 % , Adapun program yang dilaksanakan adalah :

- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan Program tersebut diatas dimaksudkan untuk mengetahui hasil Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti . Target dari kegiatan ini sebesar 81 % . Realisasi yang dicapai per tanggal 31 Desember 2022 adalah 100 % , sehingga dapat dikatakan bahwa target dapat tercapai 123.5 % .

e) Analisis atas keberhasilan dan kegagalan serta peningkatan dan penurunan kinerja

Berdasarkan pengukuran kinerja di atas, dapat diperoleh data dan informasi kinerja PD Kecamatan Puri sebagai berikut :

1. Tujuan dan sasaran PD Kecamatan Puri dalam meningkatkan kinerja di Tahun 2022 telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan, sasaran pertama Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah, dengan indikator Nilai Reformasi Birokrasi Kecamatan Puri dan Nilai Sakip dari Target tahun 2022 Nilai RB : 66 diperoleh nilai RB tahun 2022 : 82,44 sehingga dapat tercapai : 124,9 % , dan untuk Target Nilai Sakip tahun 2022 : 83 didapat nilai tahun 2022 : 84,23 sehingga tercapai 101,7 %. Sasaran kedua mewujudkan Pelayanan Publik yang optimal, dengan indikator nilai IKM Kecamatan , target 84, realisasi 89,32 dengan capaian 106 %.
2. Keberhasilan yang dicapai karena ketepatan dalam menentukan tujuan dan sasaran PD Kecamatan Puri melalui perencanaan program-program dan kegiatan yang tepat dan terarah dalam mewujudkan tata kelola birokrasi pemerintah daerah dan mewujudkan pelayanan public yang optimal.
3. Kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun 2022 hampir tidak ada, walaupun dalam pencapaian program dan kegiatan masih terdapat kegiatan yang tidak mencapai target, akan tetapi banyak program dan kegiatan yang mengalami keberhasilan, sehingga tujuan dan sasaran PD Kecamatan Puri dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Langkah- langkah yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan adalah :

- Melakukan evaluasi berkala setiap bulan terhadap kegiatan- kegiatan yang rendah dalam pencapaian target baik fisik maupun keuangan.
- Memberi penghargaan bagi kegiatan dengan pencapaian terbaik dan peringatan /teguran bagi kegiatan dengan pencapaian rendah sebagai upaya mendorong kinerja tiap seksi/sub bagian dalam pelaksanaan kegiatan.
- Koordinasi baik ditingkat intern maupun eksternal guna mendukung tujuan dan sasaran PD Kecamatan Puri.
- Menambah sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pembangunan infrastruktur kota.

f) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.7
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintah Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	106 %	94,27	5,73
2	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal	Nilai IKM	100 %	97,91 %	2,09

Uraian penjelasan tabel :

Secara umum penyerapan anggaran terealisasi dengan maksimal dengan tetap mencapai target kegiatan yang telah direncanakan . Ada beberapa hambatan yang dilalui selama tahun Anggaran 2022 . Diantaranya anggaran kegiatan rutin .

PENYAJIAN DATA KINERJA

Tabel 3.8
PEHITUNGAN TARGET DAN REALISASI CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) TAHUN 2022

NO.	URAIAN	TARGET (%)	REALISASI (%)	%
1	2	3	4	5
A.	PELAYANAN BIDANG PERIJINAN	0	0	-
	1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) paling besar 200 m2, tidak bertingkat, dan kecuali pengembang perumahan, serta tidak untuk tempat usaha	0	0	-
B.	PELAYANAN BIDANG NON PERIZINAN	100	100	100
	1 Penetapan gaji berkala pegawai staf Kecamatan	13	13	100
	2 Pemberian izin cuti Pegawai staf Kecamatan	2	2	100
	3. Penetapan kenaikan pangkat Pegawai Kecamatan	3	3	100
	4 Penetapan Batas Usia Pensiun Pegawai Kecamatan	1	1	100

5	Pengusulan Pegawai yang mengikuti Pendidikan formal	4	4	100
6	Pengusulan Pegawai untuk mengikuti Peningkatan Potensi SDM	23	23	100
7	Pengusulan Pegawai untuk mengikuti Diklat PIM	1	1	100
8	Pelantikan Pejabat Kepala Desa	2	2	100
9	Pelantikan keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Penggantian Antar Waktu	2	2	100
10	Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDES	16	16	100
11	Pemberian Rekomendasi atas permohonan Subsidi BBM	31	31	100
12	Menerbitkan Surat Keterangan Dispensasi Nikah	78	78	100
13	Menerbitkan Surat Keterangan Subsidi Listrik	3	3	100
14	Menerbitkan Surat Keterangan Jampersal	32	32	100
15	Menerbitkan Surat Keterangan untuk penelitian	12	12	100
16	Menerbitkan Surat Keterangan Pernyataan Ahli Waris	478	478	100
17	Menerbitkan Surat Keterangan lain-lain (Pengaduan) selama 1 tahun	3	3	100
18	Jumlah Pelayanan yang dilayani selama tahun 2022 di Kec. Puri	701	701	100

(Sumber : Data Seksi Pelayanan dan Kepegawaian Kec. Puri)

Dari uraian tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk target pelayanan di tahun 2022 sebanyak 1000 dirasa kurang cermat / memadai sehingga pencapaian indicator pelayanan tidak dapat dicapai yang hanya tercapai 701 pelayanan dari target yang ditentukan sebanyak 1000 pelayanan , untuk itu di tahun depan diharapkan dalam menentukan target pelayanan agar lebih dicermati lagi .

Tabel 3.9
Perbandingan Jumlah Anggaran dan Penyerapan Anggaran Tahun 2022

NO	PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.636.893.896	3.428.644.347	97,27
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	50.000.000	49.822.000	99,64
3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	342.099.500	334.090.200	97,65

C. Realisasi Anggaran

Dari pagu anggaran Belanja Langsung Kecamatan Puri Tahun 2022 sebesar Rp.4.028.993.396,00 penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.3.812.556.547,00 atau 94.63 % dengan rincian per program / kegiatan / sub kegiatan sebagai berikut :

RINGKASAN ANGGARAN DAN REALISASI APBD KECAMATAN PURI TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022		Selisih (Rp)	%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.636.893.896,00	3.428.644.347,00	208.249.549,00	97,27
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.000.000,00	14.980.900,00	19.100,00	99,87
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000,00	7.480.900,00	19.100,00	99,75
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.607.491.000,00	2.464.987.140,00	142.503.860,00	94,53
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.607.491.000,00	2.464.987.140,00	142.503.860,00	94,53
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.400.000,00	26.224.000,00	176.000,00	99,33
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	26.400.000,00	26.224.000,00	176.000,00	99,33
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	242.445.100,00	234.368.150,00	8.076.950,00	96,66

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000,00	4.987.000,00	13.000,00	99,74
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	155.445.100,00	149.596.150,00	5.848.950,00	96,24
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.000.000,00	26.971.000,00	29.000,00	99,89
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000,00	2.900.000,00	100.000,00	96,67
	Penyediaan Bahan/Material	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00	100,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	17.000.000,00	14.914.000,00	2.086.000,00	87,73
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.730.696,00	62.957.207,00	15.773.489,00	79,96
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50.730.696,00	35.894.055,00	14.836.641,00	70,75
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28.000.000,00	27.063.152,00	936.848,00	96,65
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	495.000.000,00	462.820.000,00	32.180.000,00	93,50
	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas	495.000.000,00	462.820.000,00	32.180.000,00	93,50
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.827.100,00	162.306.950,00	9.520.150,00	94,45
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.500.000,00	31.150.000,00	1.350.000,00	95,85
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	129.327.100,00	121.376.950,00	7.950.150,00	93,85
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	9.780.000,00	220.000,00	97,80
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50.000.000,00	49.822.000,00	178.000,00	99,64
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	50.000.000,00	49.822.000,00	178.000,00	99,64
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	35.000.000,00	34.822.000,00	178.000,00	99,49
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	100

III.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	342.099.500,00	334.090.200,00	8.009.300,00	97,66
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	342.099.500,00	334.090.200,00	8.009.300,00	97,66
	Fasilitasi Administrasin Tata Pemerintahan Desa	106.099.500,00	102.420.600,00	3.678.900,00	96,53
	Fasilitasi sinkronisasi perencanaann pembangunan daerah dengan pembangunan Desa	36.000.000,00	35.200.000,00	800.000,00	97,78
	Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum	90.000.000,00	88.941.600,00	1.058.400,00	98,82
	Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan	110.000.000,00	107.528.000,00	2.472.000,00	97,75
	JUMLAH	4.028.993.396,00	3.812.556.547,00	216.436.849,00	94,63

**BAB IV
PENUTUP**

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian sasaran strategik, dapat diperoleh hasil evaluasi kinerja kegiatan yang secara nyata menunjukkan bahwa dari 2 indikator sasaran kinerja kegiatan Tahun 2022, 1 indikator kinerja yang mencapai 106 % capaian kinerja yaitu Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintah Daerah dan 1 indikator mencapai 124,6 % yaitu Terwujudnya Pelayanan Publik yang Optimal.

Langkah-langkah yang dilaksanakan untuk memenuhi target :

- Melakukan perencanaan yang seksama , cermat merupakan langkah guna menekan jarak/ kesenjangan antara target dan realisasi.
- Pada tahun-tahun mendatang efisiensi dan manfaat anggaran adalah hal yang harus dilakukan sebagai langkah untuk memenuhi target dengan dana yang tersedia.

Dari total belanja langsung OPD Kecamatan Puri Tahun 2022 sebesar Rp.4.028.993.396,00 penyerapan/realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp.3.812.556.547,00 atau 94,63 %

Mojokerto , Januari 2023

CAMAT PURI

NALURITA P. SSTP. M.Med.Kom.

Pembina

NIP. 19810402 199912 2 001